

RPSEP-72

PENGARUH PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL TERHADAP ANGGARAN KINERJA DI PROVINSI BANTEN

Rakhmini Juwita, SE,M.Si
Universitas terbuka
Galuh Tresna Murti, SE, M.Si
Politeknik LP3i Bandung
rakhmini@ut.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelaksanaan anggaran kinerja terhadap audit internal di Propinsi Banten. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksplanatory merupakan survey terhadap 8 kabupaten/ kota dan 1 propinsi di Provinsi Banten. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik survey menggunakan instrument. Analisis data yang digunakan menggunakan regresi linier sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran kinerja memiliki pengaruh yang moderat dan positif terhadap audit internal.

Kata Kunci: audit internal dan anggaran kinerja

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah memiliki program dan tujuan kerja yang telah ditentukan pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut disusunlah berbagai program kerja yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah dan melibatkan seluruh sumber daya dalam pemerintah daerah termasuk sumber daya keuangan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter (Mardiasmo, 2009:61). Pelaksanaan anggaran sektor publik di Negara Indonesia menggunakan sistem anggaran kinerja. Anggaran berbasis kinerja merupakan prosedur dan mekanisme yang ditujukan untuk peningkatan efisiensi pengalokasian dan produktivitas dalam pembiayaan sektor publik dengan memperkuat hubungan antara anggaran/dana (yang tersedia untuk berbagai kepentingan/urusan sektor publik) dengan hasil dan/atau keluaran melalui penggunaan informasi kinerja (pengukuran kinerja) dalam pembuatan keputusan alokasi sumber daya yang ada.

Dalam rangka menciptakan akuntabilitas pengelolaan sumber daya keuangan dan memastikan semua program atau kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dibutuhkan suatu fungsi audit internal atas pelaksanaan anggaran. Audit internal merupakan operasional kebijakan dan prosedur yang diimplementasikan oleh seluruh satuan kerja pada unit pemerintahan. Kesuksesan implementasi audit internal akan mempengaruhi tata kelola pemerintahan yang baik. Audit internal memiliki tugas untuk menilai apakah sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan berjalan dengan baik serta setiap bagian melaksanakan kebijakan sesuai dengan rencana dan prosedur yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis terdorong untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Pengaruh Pelaksanaan Audit Internal terhadap Anggaran Kinerja di Propinsi Banten”

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh pelaksanaan Audit Internal terhadap Anggaran Kinerja di Provinsi Banten.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh pelaksanaan audit internal terhadap anggaran kinerja di Propinsi Banten.

KAJIAN LITERATUR

Audit Internal

The Institute of Internal Auditors (2004) mendefinisikan audit internal sebagai berikut:

Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes.

Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi. Yang termasuk audit internal adalah audit yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) di lingkungan Lembaga Negara dan BUMN/BUMD , Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwilprop), Inspektorat Wilayah

Kabupaten/Kota (Itwilkab/Itwilko), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (Mardiasmo, 2009:193)

Audit internal adalah kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas pengelolaan resiko, pengendalian, dan proses *governance* (SPAI, 2004:9)

Menurut Soekrisno Agus (2004:222) berbeda dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP, yang tujuannya adalah memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang disusun manajemen maka tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor adalah untuk membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya.

Menurut *The Institute Of Internal Auditor* (2012) kegiatan audit internal harus dilakukan secara efektif dan dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi dan *stakeholder*. Kegiatan audit internal dilakukan sebagai berikut:

1. *Planning/* Perencanaan.

Pimpinan audit harus menetapkan rencana audit berdasarkan risiko untuk menentukan prioritas kegiatan audit internal, sesuai dengan tujuan organisasi. Perencanaan audit internal harus berdasarkan pada penilaian risiko yang terdokumentasi, yang dilakukan setiap tahun. Masukan dari manajemen dan dewan harus dipertimbangkan

2. *Communication and Approval/* Komunikasi dan Persetujuan

Pimpinan audit harus mengkomunikasikan rencana kegiatan audit internal dan kebutuhan sumber daya, termasuk perubahan sementara yang signifikan, kepada pimpinan organisasi dan Dewan untuk diperiksa dan disetujui. Pimpinan audit harus mengkomunikasikan keterbatasan sumber daya.

3. *Resource Management/* Pengelolaan Sumber Daya

Pimpinan audit harus memastikan bahwa sumber daya audit internal adalah tepat, cukup, dan secara efektif dikerahkan untuk mencapai rencana yang telah disetujui. Kesesuaian sumber daya berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lain yang dibutuhkan

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sumber daya digunakan secara efektif dan mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan rencana

4. *Policies and Procedures/ Kebijakan dan Prosedur*

Pimpinan audit harus menetapkan kebijakan dan prosedur untuk mengarahkan aktivitas audit internal.

5. *Coordination/ Koordinasi*

Pimpinan audit harus berbagi informasi dan mengkoordinasikan kegiatan dengan auditor untuk memastikan kegiatan yang tepat dan meminimalkan duplikasi kegiatan

6. *Reporting to Senior management and the board/ Pelaporan ke Pimpinan Manajemen dan Dewan*

Pimpinan audit harus melaporkan secara berkala kepada pimpinan manajemen dan dewan sesuai tujuan kegiatan audit internal, wewenang, tanggung jawab, dan kinerja sesuai rencana. Pelaporan juga harus mencakup pengungkapan risiko yang signifikan dan masalah pengendalian, termasuk risiko penipuan, isu-isu pemerintahan, dan hal-hal lain yang diperlukan atau diminta oleh pimpinan manajemen dan dewan

Anggaran Kinerja

Pendekatan anggaran kinerja merupakan perbaikan dari sistem anggaran tradisional yang memiliki kelemahan yaitu berorientasi pada input saja, kemampuan menghabiskan atau menyerap anggaran sebagai salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan organisasi, tidak memberikan informasi kinerja sehingga pengendalian kinerja menjadi sulit (Indra Bastian, 2010: 195)

Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja output. Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolok ukur kinerja sebagai instrument untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. kegiatan tersebut mencakup pula penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2009:84)

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur anggaran kinerja menurut Kepmendagri No.29 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- 1) Masukan (*input*), yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber-sumber; dana, sumber daya manusia, waktu, teknologi dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan.
- 2) Keluaran (*output*) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang/jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan
- 3) Hasil (*outcome*) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan
- 4) Manfaat (*benefit*) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah daerah dari hasil
- 5) Dampak (*impact*) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat.

Performance Budgeting (anggaran yang berorientasi kinerja) adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan sangat berkaitan erat dengan visi, misi serta rencana strategis organisasi. *Performance budgeting* merupakan teknik penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja (*work load*) dan biaya unit (*unit cost*) dari setiap kegiatan yang terstruktur. Struktur ini diawali dengan pencapaian tujuan, program dan didasari pemikiran bahwa penganggaran sebagai alat manajemen (Indra Bastian, 2010:202).

Menurut Robinson (2007) ada 4 mekanisme mendasar dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yaitu:

- 1) Program penganggaran, menggunakan informasi biaya dan manfaat yang bertujuan untuk prioritas pengeluaran
- 2) Pendanaan yang terkait dengan hasil kinerja yang menghubungkan tingkat hasil target yaitu dari output dan/ atau hasil yang diharapkan dari lembaga
- 3) Insentif anggaran kinerja di lembaga dapat memotivasi lembaga untuk melakukan lebih baik dengan memberi penghargaan kepada mereka yang memiliki kinerja baik secara finansial (juga memberikan sanksi finansial dengan kinerja yang tidak memuaskan).
- 4) Rumus pendanaan yaitu dari input dana yang ada mendapat hasil yang diharapkan dan/ atau nyata (output atau hasil).

Siklus anggaran kinerja menurut Shah dan Cullin (2007) adalah sebagai berikut:

1. Dalam perencanaan anggaran, anggaran mencakup indikator-indikator kinerja untuk memperlihatkan tingkat kinerja yang diinginkan; individu/ lembaga pelayanan dapat

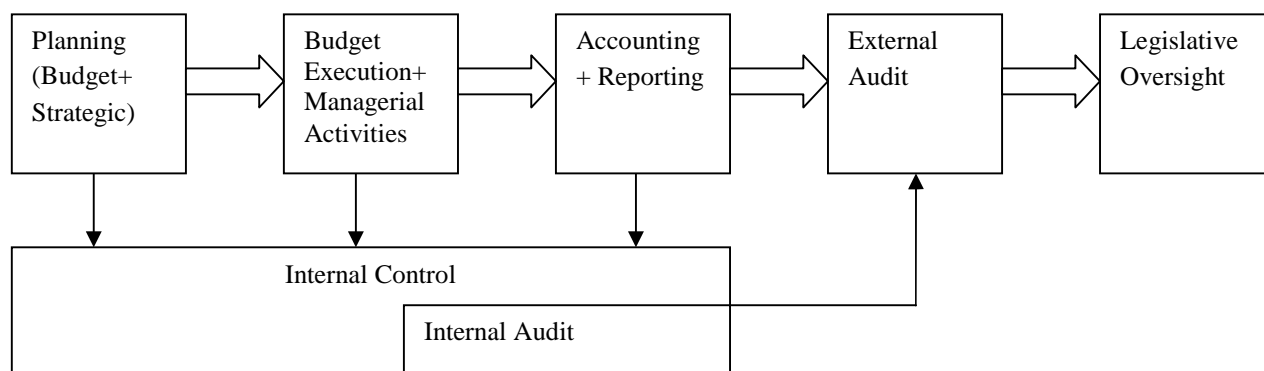
- menggunakan indikator tersebut untuk menunjukkan prestasi lembaga di masa lalu dan membantu estimasi pengajuan anggaran lembaga
2. Pada tahap pelaksanaan anggaran, pimpinan dapat menggunakan indikator kinerja untuk memperjelas tujuan organisasi, pengawasan terhadap pencapaian tujuan, dan menemukan masalah operasional. Saat informasi kinerja yang tersedia sudah merata, maka akan memberikan standar bagi pimpinan organisasi untuk membandingkan kinerja dari waktu ke waktu
 3. Dalam evaluasi anggaran dan audit, adanya informasi indikator kinerja tentang dana yang dianggarkan untuk membantu para pembuat kebijakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas program pemerintah

Kerangka Pemikiran

Salah satu fungsi utama internal audit adalah pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen sektor publik meliputi seluruh kebijakan dan prosedur pemerintah dan manajemen entitas sektor publik yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas sumber daya. Pengendalian utama pada sektor publik yaitu pengendalian dalam sistem pengelolaan keuangan Negara yang meliputi strategi perencanaan anggaran, kegiatan manajerial (pengadaan, utang publik dan asset manajemen), akuntansi dan pelaporan, audit internal dan eksternal, dan pengawasan legislatif (Asere,2009:21).

Menurut Baltaci & Yilmaz (2006:15) Pengendalian internal dan audit merupakan komponen utama dari Sistem Pengelolaan Keuangan Negara untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam kegiatan pemerintah daerah. Fungsi pengendalian internal dan audit mendukung proses desentralisasi fiskal dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan sumber daya publik, memastikan alokasi sumber daya publik sesuai dengan prioritas rakyat dan mendukung *fiscal agregat*. Tujuan dari audit internal yaitu untuk menambah nilai kegiatan dan meningkatkan struktur pengendalian organisasi. Audit internal juga sebagai alat untuk menilai sejauhmana pemerintah dalam melaksanakan anggaran untuk memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat. Pelaksanaan anggaran tersebut dapat dilakukan melalui sistem anggaran kinerja yang memiliki tolok ukur dalam pengukuran *input, output dan outcome*.

Gambar Siklus Manajemen Keuangan Publik



Sumber : Baltaci & Yilmaz (2006)

Fungsi audit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen keuangan pemerintah dan alat untuk meningkatkan kinerja di sektor publik. Pentingnya *good governance* dan akuntabilitas mendorong pemerintah untuk menunjukkan rasa tanggung jawab dalam penggunaan dana publik dan efisiensi dalam penyampaian layanan sehingga membutuhkan audit internal untuk membantu pemerintah dalam menggunakan sumber daya yang terbatas, digunakan lebih efisien dan juga efektif dalam menangani risiko manajemen (Asere, 2009:23).

Menurut peraturan pemerintah No.79 Tahun 2005 Inspektorat daerah melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui :

- 1) Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
- 2) Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu.
- 3) Pengujian terhadap laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari unit atau satuan kerja.
- 4) Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, dan nepotisme.
- 5) Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan
- 6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa

Hal tersebut jelas bahwa Audit internal mempengaruhi keberhasilan atas implementasi anggaran berbasis kinerja, karena audit internal menilai atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan yang diimplementasikan dalam anggaran kinerja. Dengan adanya audit internal dalam pemerintah maka implementasi anggaran kinerja berjalan secara maksimal dan dapat meningkatkan *good governance*.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Objek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan audit internal dan anggaran kinerja

Operasionalisasi Variabel

Pada penelitian ini terdapat dua variabel yaitu pelaksanaan audit internal dan anggaran kinerja. Dalam penelitian ini pelaksanaan audit internal merupakan variabel independen sedangkan anggaran kinerja merupakan variabel dependen

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian ini, maka operasional variabel penelitian perlu ini didefinisikan terlebih dahulu sebagai dasar penyusunan kuisisioner. Definisi masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Variabel *Independen* (X)

Implementasi Audit Internal (X2). Untuk mengukur variabel implementasi audit internal dalam penelitian ini menggunakan standar pelaksanaan kegiatan audit internal yang dikeluarkan oleh *The Institute of Internal Auditor* (2012) dan disesuaikan dengan standar Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal (2004) yaitu sebagai berikut:

- (1) Perencanaan. Dengan indikator sebagai berikut: (a) adanya penetapan rencana audit berdasarkan resiko setiap tahun, (b) penentuan tujuan dan lingkup audit, (c) menyusun program kerja untuk mencapai sasaran penugasan.
- (2) Komunikasi dan Persetujuan, dengan indikator sebagai berikut: (a) komunikasikan rencana kegiatan audit internal dan kebutuhan sumber daya kepada pimpinan manajemen, (b) adanya persetujuan program kerja audit dari pimpinan manajemen
- (3) Pengelolaan Sumber Daya, dengan indikator sebagai berikut: (a) menentukan sumberdaya yang sesuai untuk mencapai sasaran penugasan, (b) sumber daya digunakan secara efektif dan mendapatkan hasil yang optimal
- (4) Kebijakan dan Prosedur. Pimpinan audit harus menetapkan kebijakan dan prosedur untuk mengarahkan aktivitas audit internal.
- (5) Koordinasi. Pimpinan audit harus berbagi informasi dan mengkoordinasikan kegiatan dengan auditor untuk memastikan kegiatan yang tepat dan meminimalkan duplikasi kegiatan
- (6) Pelaporan ke Pimpinan Manajemen dan Dewan, Dengan indikator sebagai berikut: (a) melaporkan kegiatan audit secara berkala kepada pimpinan manajemen, (b) pelaporan juga

harus mencakup pengungkapan risiko dan masalah pengendalian, (c) laporan berisi penjelasan tentang tujuan audit, ruang lingkup, pertanyaan, prosedur umum, temuan, dan rekomendasi

(7) Pemantauan tindak lanjut, dengan indikator sebagai berikut: (a) adanya tindak lanjut manajemen terhadap tanggapan audit, (b) penanggungjawab fungsi audit internal memeriksa kembali auditi untuk melihat apakah tindakan korektif telah dilakukan dan hasil yang diharapkan tercapai, atau manajemen telah menerima tanggung jawab tidak mengambil tindakan korektif.

2. Variabel Dependen (Y)

Sering disebut juga variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2008: 59). Dalam kaitannya dengan masalah ini maka yang menjadi variabel dependennya yaitu pelaksanaan anggaran kinerja. Untuk mengukur variabel implementasi anggaran berbasis kinerja dalam penelitian ini menggunakan teori tahapan dalam anggaran kinerja yang baik menurut Shah dan Cullin (2007) dan disesuaikan dengan teori dari karakteristik anggaran kinerja oleh Robinson (2007) dan Young Richard (2003) yaitu sebagai berikut:

- (1) Perencanaan Anggaran, dengan indikator: (a) anggaran dibuat berdasarkan visi, misi dan tujuan unit kerja, (b) anggaran dibuat berdasarkan informasi biaya dan manfaat yang bertujuan untuk prioritas pengeluaran, (c) adanya Penetapan indikator kinerja dalam anggaran, (d) adanya penyesuaian program/ kegiatan untuk mengurangi kesenjangan kinerja, (e) anggaran dibuat berdasarkan alokasi sumber daya yang tersedia
- (2) Pelaksanaan Anggaran, dengan indikator: (a) adanya pengukuran *input*, (b) adanya pengukuran *output*, (c) adanya pengukuran *outcome*, (d) adanya pengawasan terhadap pencapaian tujuan
- (3) Evaluasi dan Pelaporan Anggaran, dengan indikator: (a) adanya informasi indikator kinerja dan tentang dana yang dianggarkan, (b) adanya evaluasi untuk mengukur efisiensi dan efektivitas program

Sumber dan Teknik pengumpulan Data

Sumber Data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner (angket). Kuesioner tersebut diberikan secara langsung kepada Bappeda dan DPPKD dan Inspektorat pemerintah daerah di lingkungan Propinsi Banten.

Analisis Regresi Sederhana

Regresi linier sederhana digunakan untuk mendapatkan hubungan matematis dalam bentuk suatu persamaan antara variabel tak bebas tunggal dengan variabel bebas tunggal.

PEMBAHASAN

Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa implementasi audit internal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. Hal tersebut berdasarkan hasil uji statistik diperoleh angka koefisien jalur = 0,558 dengan nilai signifikansi $0,016 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa semakin baik Implementasi Audit Internal (X) maka akan semakin baik pula Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Y).

Dari nilai R implementasi audit internal terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja sebesar 0,558, didapat besarnya pengaruh langsung adalah 31,1% yang artinya menurut kategori Guilford pengaruh tersebut moderat. Masih ada 68.9% atau pengaruh variabel lainnya (epsilon) diluar pengaruh X yang tidak diteliti. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil perhitungan statistika dengan menggunakan SPSS.

Tabel Koefisien Determinasi

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.552 ^a	.311	.268	2.42435

a. Predictors: (Constant), X

Hal ini berarti ada kecenderungan bahwa implementasi audit internal yang lebih baik mampu mendorong Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yang lebih baik. Berdasarkan kontribusi pengaruhnya terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja, implementasi audit internal menyumbangkan pengaruh sebesar 31.1%, (arah pengaruh positif), yang diperoleh sebagai nilai kuadrat dari nilai $R = 0,558$. Maknanya bahwa sumbangan 31.1% variabel implementasi anggaran berbasis kinerja dijelaskan oleh variabel implementasi audit internal dan sisanya (epsilon) sebesar 68.9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Menurut kategori Guilford pengaruh yang diberikan implementasi audit internal ini masuk dalam kategori moderat. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja selain implementasi audit internal menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/ BPKP

(2005:29) adalah (1) kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi, (2) fokus penyempurnaan administrasi secara terus menerus, (3) sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang, waktu dan orang), (4) penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) yang jelas, (5) keinginan yang kuat untuk berhasil. Kepemimpinan dan komitmen merupakan komponen utama dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan organisasi sehingga apabila kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi baik maka implementasi anggaran berbasis kinerja dapat dijalankan dengan baik. Penyempurnaan administrasi secara terus menerus dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran kinerja. Sumberdaya yang cukup juga merupakan hal utama dalam keberhasilan pelaksanaan anggaran kinerja, apabila sumberdaya yang tersedia tidak mencukupi maka anggaran kinerja tidak dapat dilaksanakan dengan baik. *Reward* dan *Punishment* merupakan metode untuk memotivasi seseorang untuk melakukan yang terbaik, sehingga apabila anggaran kinerja dilakukan organisasi dengan baik maka akan mendapatkan *reward*.

Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut, maka pengujian yang dilakukan oleh penulis mendukung teori yang telah dikemukakan oleh Asere (2009) yang menyatakan bahwa “salah satu fungsi utama internal audit adalah pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen sektor publik meliputi seluruh kebijakan dan prosedur pemerintah dan manajemen entitas sektor publik yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas sumber daya. Pengendalian manajemen dapat dikatakan sebagai pengendalian internal. Pengendalian internal utama pada sektor publik yaitu pengendalian dalam sistem pengelolaan keuangan Negara meliputi strategi perencanaan anggaran”, perencanaan anggaran tersebut salah satunya menggunakan sistem anggaran kinerja. Sehingga dengan adanya audit internal akan meningkatkan pelaksanaan anggaran kinerja yang semakin baik dalam organisasi, karena audit internal merupakan alat pengendalian internal dalam operasional organisasi. Sejalan yang dikatakan oleh Baltaci & Yilmaz (2006:11) yang menyatakan tujuan dari audit internal untuk menambah nilai dan meningkatkan kegiatan dan struktur pengendalian organisasi. Audit internal merupakan alat untuk menilai sejauhmana pemerintah dan pihak yang terkait dalam melaksanakan anggaran dan pelayanan yang efektif kepada masyarakat.

Semua unsur dalam dimensi implementasi audit internal akan mempengaruhi pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yang dilakukan oleh instansi. Sehingga jika semua permasalahan dalam seluruh dimensi pelaksanaan audit internal telah dibenahi, maka akan berpengaruh positif terhadap pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yang semakin baik pula.

Oleh karena itu peran auditor sangatlah penting untuk menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan audit internal tersebut, karena audit internal dilakukan untuk menilai keberhasilan dalam program/kegiatan yang tertuang dalam anggaran suatu organisasi.

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa implementasi audit internal masih belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yang baik dan harus ditingkatkan lagi dalam berbagai aspeknya, moderat bukan berarti bahwa pelaksanaan audit internal yang telah dimiliki selama ini tidak baik, namun untuk mendukung kegiatan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yang baik memang harus ada beberapa dimensi yang harus ditingkatkan.

KESIMPULAN

Implementasi Audit Internal mempunyai pengaruh positif terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja di Propinsi Banten. Hal ini berarti ada kecenderungan bahwa implementasi audit internal yang lebih baik mampu meningkatkan pelaksanaan prinsip anggaran kinerja yang lebih baik. Sedangkan faktor lainnya yang mempengaruhi implementasi anggaran berbasis kinerja antara lain kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi, fokus penyempurnaan administrasi secara terus menerus, sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang, waktu dan orang), penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) yang jelas, keinginan yang kuat untuk berhasil

DAFTAR PUSTAKA

Asere Thomas, 2009. *Internal Auditing in the Public Sector: Promoting Good Governance and Performance Improvement*. The International Consortium on Governmental Financial Management (ICGFM) Volume IX number 1

- Baltaci, M. & Yilmaz, S. (2006), *Keeping an Eye on Subnational Governments: Internal Control and Audit at Local Levels*, World Bank Publications
- Indra Bastian, 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Erlangga, Jakarta
- Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal, 2004. *Standar Profesi Auditor Internal (SPAI)*. Jakarta
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik –Ed IV.- (2009)*, ANDI, Yogyakarta
- Republik Indonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Serta Tata Cara Pengawasan, Penyusunan Dan Perhitungan APBD.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
- Robinson M. (ed.), 2007, *Performance Budgeting. Linking Funding and Results*, IMF, Washington D.C.
- Shah Anwar, Cunli Shen, 2007. Citizen-Centric Performance Budgeting at the Local Level. Dalam Anwar Shah (penyunting). *PUBLIC SECTOR GOVERNANCE AND ACCOUNTABILITY SERIES LOCAL BUDGETING*. Hal 151-178. The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. Washington DC
- Soekrisno Agoes, 2004. *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) Oleh Kantor Akuntan Publik Edisi Ketiga*. Jilid II (cetakan Ke 5 2009). Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. Jakarta
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- The Institute of Internal Auditors Research Foundation, 2004. *THE PROFESSIONAL PRACTICES FRAMEWORK*. Florida. ISBN 0-89413-544-9 04314 04/04
- The Institute Of Internal Auditor, 2012. *THE INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING (STANDARDS)*.
- Young, Richard. D. *Performance Based Budget System*. Public Policy & Practices January 2003. USC INSTITUTE FOR PUBLIC SERVICE AND POLICY RESEARCH